

**TESIS**

**PROBLEMATIKA PENENTUAN BIAYA EKSEKUSI  
DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN  
KERJA DI PENGADILAN HUBUNGAN  
INDUSTRIAL  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
276/K/PDT.SUS-PHI/2018)**



**DESNAL NATALIO SILALAH**

**NPM: 185202962**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
(2021)**

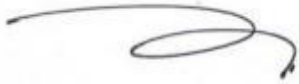



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

---

### PERSETUJUAN TESIS

Nama : Desnal Natalio Silalahi  
Nomor Mahasiswa : 185202962/MIH  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : **Problematika Penentuan Biaya Eksekusi Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 276/K/Pdt.Sus-Phi/2018).**

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.	12 Juni 2021	
Dr. V. Hari Supriyanto, S.H.,M.Hum.	12 Juni 2021	



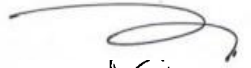


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

---

**PENGESAHAN UJIAN TESIS**

Nama : Desnal Natalio Silalahi  
Nomor Mahasiswa : 185202962/MIH  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : **Problematika Penentuan Biaya Eksekusi Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 276/K/Pdt.Sus-Phi/2018).**

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 8/7/2021.

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.	
2. Sekretaris	Dr. V. Hari Supriyanto, S.H.,M.Hum.	
3. Anggota	Dr. IG. Sumarsono, S.H.,M.Hum.	

**Ketua Program Studi**



Dr. Hyronimus Rithi, S.H, LL.M.

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**



  
Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandah tangan di bawah ini:

Nama : Desnal Natalio Silalahi

No. Mhs : 185202962

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

Tesis ini dengan judul “Problematika Penentuan Biaya Eksekusi Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 276/K/Pdt.Sus-Phi/2018).” merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi. Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Magister Hukum), baik di Universitas Atma Jaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Tesis ini merupakan gagasan, rumusan dan penelitian dari penulis sendiri. Semua informasi yang ada dalam tesis ini yang akan dikutip dari penulis lain telah diberikan penghargaan dengan menyebutkan secara lengkap identitas pengarang, dan bukunya sesuai dengan standar penulisan yang baik dan benar. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan atau saksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta,  
Yang menyatakan



Desnal Natalio Silalahi

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih yang telah melimpahkan berkat dan rahmat kasihnya kepada penulis, sehingga penyusunan tesis yang berjudul “Problematika Penentuan Biaya Eksekusi Pemutusan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial” dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penyusunan tesis ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak yang selalu membantu dan mendorong penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ir. A. M. Ade Lisantono, M.Eng, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Hyronimus Rithi, S.H, LL.M, selaku Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibuk Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing/Penguji yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dan petunjuk bagi penyusunan tesis ini.

5. Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing/Penguji yang telah membantu memberikan bimbingan dan petunjuk bagi penyusunan tesis ini.
6. Bapak Dr. IG. Sumarsono Raharjo SH.,M.Hum selaku Anggota/Penguji yang telah memberikan masukan dan petunjuk bagi perbaikan penyusunan tesis ini.
7. Bapak/Ibu dosen pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Bapak/Ibu Panitera dan Para Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset pada lingkungan Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta, penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pendampingan, masukan dan motivasi.
9. Kedua Orang Tuaku tercinta, Kasmien Fabianus Silalahi dan Masti Manurung yang memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan studi S-2. Terima kasih untuk doa-doa yang ayah dan bunda berikan demi kesuksesan dan kelancaran studi penulis, dan mohon maaf sebesar-besarnya atas semua kesusahan dan kesalahan yang penulis lakukan kepada ayah dan bunda selama ini.
10. Saudara-saudara aku, abang Rinto Martinus Silalahi, Jimmy Cristover Silalahi S.H, M.H., adek Bernard Bobby Silalahi, kakak Indah Simbolon, Keponakanku Jonathan Parasian Silalahi, Jesica

Adrelia Silalahi terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis selama ini.

11. Teman-teman Magister Hukum, Angkatan 2017-2018 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkenan memberikan dukungan dan bantuan guna terselesainya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan dunia pendidikan terkhususnya pada bidang ilmu hukum bisnis.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN UJIAN TESIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Mahkamah Agung Republik Indonesia .....	16
1. Mahkamah Agung .....	16
2. Kewenangan Pembentukan Peraturan Oleh Mahkamah Agung.....	17
3. Putusan Mahkamah Agung.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Perselisihan Hubungan Industrial .....	22
1. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial.....	22
2. Jenis-Jenis Perselisihan Hubungan Industrial.....	22
3. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja .....	24
4. Jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja .....	25
5. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja.....	26
6. Subjek Hukum, Fungsi dan Sistem dalam Perselisihan Hubungan Industrial.....	26



7. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial .....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Putusan Pengadilan .....	30
1. Pengertian dan Pengaturan Eksekusi .....	30
2. Jenis-Jenis Eksekusi .....	34
3. Pengertian Putusan Pengadilan.....	36
4. Kekuatan Putusan .....	38
D. Landasan Teori .....	42
1. Teori keadilan .....	42
2. Konsep Perlindungan Hukum.....	49
<b>CARA PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Jenis Penelitian .....	51
B. Data.....	51
C. Metode Pengumpulan Data .....	54
D. Lokasi Penelitian .....	55
E. Analisis Data.....	55
F. Penarikan Kesimpulan .....	56
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. Penyelesaian Penentuan Biaya Eksekusi Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial Yang Putusannya Diatas Rp.150.000.000,- .....	57
1. Pengaturan Eksekusi Dalam Hukum Acara Perdata.....	57
2. Pengaturan Serta Tata Cara Atau Pelaksanaan Eksekusi Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).....	62
3. Kajian Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor:276K/Pdt.Sus-Phi/2018. ....	67
4. Penentuan Biaya Eksekusi Perkara PHI berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA Nomor:W13.U1/4246/ HK.02/VII/2019 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA .....	90

B. Faktor-Faktor Yang menentukan Putusan Diatas 150.000.000,- Dibebankan Kepada Pemohon Eksekusi Dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Atau Pekerja .....	113
1. Faktor Normatif Dalam Perlindungan Hak Buruh Tenaga Kerja.....	113
2. Faktor SDM Hakim dan Advokat.....	115
3. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh.....	120
4. Politik Hukum Terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI.....	125
<b>PENUTUP .....</b>	<b>128</b>
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran .....	130
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>132</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

1. Komparatif Putusan Nomor :12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Yyk. dan Putusan Nomor 276K/Pdt.Sus-PHI/2018.....	83
2. Panjar Biaya Perkara Perdata Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Pn. Yogyakarta (2019).....	91
3. Panjar Biaya Perkara Perdata Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Pn. Yogyakarta (2020).....	97

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 : Alur Penerapan Ketentuan Pasal 161 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	85
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

## ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Problematika Penentuan Biaya Eksekusi Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial” tesis dengan judul tersebut bertujuan mengetahui dan mengkaji penentuan biaya eksekusi putusan Pengadilan dalam perkara pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan politik hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berfikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan konsep perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan biaya eksekusi PHI merujuk pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA Nomor: W13.U1/4246/HK.02/VII/2019, Secara *Atributif* Ketua Pengadilan diberikan kewenangan dalam pembuatan SK berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Adapun parameter penentuan biaya yang tercantum dalam SK berdasarkan informasi /masukan dari yang melaksanakan SK terdahulu. Selain itu penentuannya bergantung pada lokasi dan obyek yang akan dieksekusi seperti halnya jarak tempuh obyek eksekusi, besar kecilnya obyek serta situasi lokasi yang akan dieksekusi.

***Kata Kunci:*** *Penentuan Biaya, Eksekusi Putusan, Pengadilan Hubungan Industrial*

## ABSTRACT

This thesis is entitled "The Problem of Determining Execution Fees in Cases of Termination of Employment at the Industrial Relations Court". The thesis with that title aims to identify and examine the determination of execution costs of Court decisions in cases of termination of employment at the Industrial Relations Court. This research is normative research using a legal-political approach. The sources of data used in this study are secondary data in primary legal materials and secondary legal materials. Methods of data collection using literature study and interviews. Primary legal materials and secondary legal materials were analyzed using the legal analysis method. The process of deductive thinking is used to conclude. The theory used as an analytical knife in this research is the theory of justice and the concept of legal protection. The results show that the determination of the execution costs of the PHI refers to the Determination of the Chairperson of the Yogyakarta Industrial Relations and Corruption Crime District Court Class IA Number: W13.U1/4246/HK.02/VII/2019, Attributively, the Chief Justice is given the authority to make a decree based on the Regulation Supreme Court Number 3 of 2012 concerning Cost of Case Settlement Process and Management at the Supreme Court and Judicial Bodies Under it. The parameters for determining the costs listed in the SK are based on information/input from those who implemented the previous SK. In addition, the determination depends on the location and the object to be executed, such as the distance traveled by the object of execution, the size of the object, and the situation of the location to be executed.

**Keywords:** *Cost Determination, Execution of Decisions, Court of Industrial Relations*